Recognized Security Organization :

Menanti Kepastian Pemerintah

MEMBANGUN SISTEM keamanan di pelabuhan tidaklah semudah yang diduga. Pelabuhan-pelabuhan Indonesia lahir dan berkembang dari pola kehidupan masyarakat tradisional, di mana pelabuhan merupakan tempat untuk mencari penghidupan. Oleh karenanya, ketika sebuah pelabuhan menerapkan keamanan ketat pada tempat-tempat khusus, warga masyarakat yang selama ini mencari penghidupan di pelabuhan harus menyingkir.

Desain keamanan di pelabuhan kini tidak lagi menjadi monopoli kerja pemerintah atau operator pelabuhan semata. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization*, pelabuhan berskala internasional dan kapal-kapal dengan bobot di atas 500 gros ton harus memiliki sertifkat ISPS Code sebagai standar keamanan yang diakui bersama. Pelabuhan dan kapal-kapal berukuran besar ini dapat memperoleh sertifikat ISPS Code apabila lolos dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut sebagai wakil pemerintah.

Sebelum proses verifikasi dilakukan maka pihak operator pelabuhan dan kapal akan mengundang perusahaan-perusahaan konsultan keamanan untuk mendesain keamanan pelabuhan dan kapal. Konsultan-konsultan inilah yang dikenal dengan nama *Recognized Security Organization (RSO)*. Sejauh ini di Indonesia ada sekitar 28 perusahaan yang memiliki izin sebagai RSO dalam tiga gelombang penerbitan izin. Izin perusahaan sebagai RSO hanya berlaku untuk dua tahun saja. Setelah dua tahun pemerintah akan mempertimban apakah perlu atau tidak u memperpanjang izin RSO se perusahaan.

Walpon Silitonga, *Marine and Insu Manager* PT. Superintending Com of Indonesia (Sucofindo), menjela bahwa, jumlah RSO yang mempe kontrak sebagai konsultan keam hanya sedikit. Ada RSO yang memiliki proyek konsultasi keam sama sekali, sementara ada RSO proyeknya banyak. Oleh karen ketika izin mayoritas RSO habis tahun 2006, ia memperoleh infor bahwa hanya ada empat RSO mengajukan permohonan perpanja izin sebagai RSO. "ISPS Code men audit satu kali dalam lima tahun. K RSO tidak ada proyek, pasti

bangkrut. Karena dia harus tunggu lima tahun lagi," tambahnya.

Max Kasengkang, Director RSO PROTECOM, menilai bahwa pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut perlu menilai ulang dari hasil evaluasi pemberian izin selama dua tahun tersebut. Perusahaannya memperoleh izin sebagai RSO sewaktu Dirjen Perhubungan Laut membuka gelombang ketiga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengajukan izin sebagai RSO. PROTECOM sendiri, lebih dikenal sebagai perusahaan jasa keamanan di Indonesia.

Keinginan perusahaan-perusahaan jasa keamanan untuk terjun menjadi RSO menjadi fenomena menarik. Max Kasengkang mengungkapkan setidaknya ada tiga perusahaan jasa keamanan yang terjun sebagai RSO selain PROTECOM. Ia menilai, kemampuan dan pengalaman perusahaan-perusahaan jasa keamanan dalam kegiatan pengamanan fisik merupakan nilai tambah bagi perusahaan jasa keamanan untuk ikut berkecimpung menjadi RSO. Walpon Silitonga juga menilai perusahaan jasa keamanan memiliki kelebihan dalam hal *intelligence* dan *security design*. "Tetapi fokusnya tetap pada *inspection, supervision, testing,* dan *assessment* di pelabuhan. Apakah mereka sanggup mengerjakan tugas-tugas tersebut?" tambahnya.

Sucofindo sendiri telah menjadi konsultan keamanan di sejumlah pelabuhan khusus, pelabuhan umum, dan kapal dagang internasional. Ketika ditanyakan mengenai dominasi RSO BUMN dalam proyek-proyek konsultan keamanan di pelabuhan, Max Kasengkang hanya mengangkat bahu sambil berkata bahwa, kemungkinan dominasi RSO BUMN dalam proyek-proyek konsultan keamanan cukup tinggi. Akan tetapi Walpon Silitonga membantah adanya kemungkinan tersebut. "Klien kami mayoritas swasta yang mengelola pelabuhan khusus. Kami harus ikuti proses tendernya. Tidak pernah kami menerima perlakuan istimewa. Semua harus *fight*!" ungkapnya.

Potensi bisnis bagi RSO di Indo sebenarnya cukup besar. Indonesia s negara maritim tentunya memer pelabuhan-pelabuhan dagang yang disinggahi oleh kapal-kapal d internasional. Akan tetapi bes potensi ini baru dapat dirasakan jika audit eksternal dilaksanakan s tahunnya. ISPS Code mengatur kew audit eksternal sebanyak satu kali lima tahun. Akan tetapi pemer Indonesia kini tengah mempersi regulasi yang mewajibkan adanya eksternal setiap 2,5 tahun.

Perkembangan ancaman keamana aksi terorisme yang terus berubah tahunnya tentu memerl pembaharuan atau variasi s keamanan agar pelabuhan tidak dengan mudah ditembus oleh p kejahatan atau teroris. Tentunya memiliki kewajiban moral untuk mengikuti perkembangan situas ancaman di lokasi klien-klien m (SJ)

Pengamanan Kantor Pemerintah

PERISTIWA KEMALINGAN tidak saja terjadi di Istana Presiden beberapa waktu lalu, tapi juga merembet ke berbagai kantor pemerintahan lain. Sebagai contoh beberapa minggu sebelum ini pembobolan berlangsung di lantai 2 dan 6 Departemen Luar Negeri. Selain itu, pencurian juga menimpa gedung Mahkamah Agung (MA) ditandai dengan raibnya berkas dokumen perkara korupsi seberat ±15 kg yang dikirim dari Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo. Tak luput pula, pencurian di pelataran parkir Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, di mana seorang staf Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta kehilangan *laptop* yang berisi berkas pemilihan kepala daerah di Jakarta dan sejumlah barang lainnya di dalam mobil yang diparkir di situ. Di samping itu masih banyak kasus sejenis yang terjadi di berbagai kantor pemerintah dengan tingkat kerugian berskala kecil yang sejauh ini tidak dilaporkan pada pihak berwajib.

Berbagai kejadian ini menimbulkan pertanyaan bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan pada kantor-kantor pemerintah? Berbagai jawaban muncul, salah satunya dari aparat keamanan setempat, seperti dituturkan salah satu kepala keamanan internal Mahkamah Agung (MA) bahwa tenaga pengamanan yang ada di MA jauh dari ideal, sulit memenuhi penjagaan selama 24 jam jika tenaga pengamanan sangat terbatas. Tidak hanya persoalan tenaga pengamanan, jawaban lain diberikan staf kantor Departemen Luar Negeri, terkait dengan ketidakakuratan penggunaan teknologi pengamanan, seperti CCTV yang dipasang di lantai 2 gedung Departemen Luar Negeri, sebagaimana diberitakan tidak mampu mendeteksi pelaku pembobolan karena alasan gelapnya ruangan. Hal menarik di sini adalah cara pemasangan teknologi CCTV yang tidak tepat sasaran dan kurang mempunyai spesifikasi baik, sangat mempengaruhi upaya pengungkapan pelaku tindak kejahatan dan perbuatan menyimpang dalam lokasi yang dimaksud.

Dugaan pro-kontra bermunculan terhadap lemahnya pengamanan di beberapa kantor pemerintah, antara lain lalainya petugas pengamanan, bentuk pengamanan fisik yang terkesan seadanya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia, dan seterusnya. Lepas dari berbagai dugaan ini, yang pasti kehilangan dan kerugian akibat kasus-kasus ini adalah hilangnya sejumlah informasi dan dokumen penting yang disimpan dalam berbagai media penyimpan apakah itu *laptop*, *flashdisk*, disket maupun bundelan kertas tersegel. Pengamanan terhadap berbagai informasi dan dokumen merupakan bagian integral dari pengamanan. Data-data peme seharusnya memperoleh perlind utuh karena menyangkut kepen pemerintah dan masyarakat

Ragam peristiwa ini menunj bahwa kantor pemerintah meru obyek vital yang tak luput dari s pembobolan dan rentan terl ancaman serta tindakan kriminal l Opini yang berkembang mengungk bahwa terdapat beberapa ciri p pencurian pada kantor pemerintah pelakunya bukan orang biasa tapi yang profesional dan mengarah keterlibatan orang dalam. Ini dikare begitu mudahnya pelaku menge petugas pengamanan setempa samping tentunya kepentingan p atau ekonomi yang mendalangi a pelaku.

Orang dalam yang dimaksud mencakup pejabat setempat, kary petugas kebersihan, pihak luar diijinkan hilir mudik dalam rua kantor, bahkan petugas pengamana sendiri. Perlakuan sikap terhadap dalam yang dicurigai, secara garis seharusnya telah tertuang dalam s pengamanan khususnya perlindu personil dan perlindungan prose

Dengan demikian manaje pengamanan kantor pemerintah h mencakup prosedur yang te pengamanan personil dan perlindu informasi yang baik. Informasi prosedur adalah aset berharga di m dalam batas tertentu tidak ur konsumsi publik. Ancaman terha informasi dan aturan prosedural sa beragam, mulai dari yang sederh sampai rumit. Karena itu pengama terhadapnya tidak semata menekan aspek fisik, tapi penguasaan tekno informasi dan pengujian prosedur me persyaratan mutlak. Pengamanan ka pemerintah harus menampil pengamanan secara terpadu y berkesinambungan, beban pengama tidak semata diemban petu pengamanan tapi harus disadari diwaspadai seluruh karyawan dan pi terkait di dalam kantor tersebut.

PT Putratama Bhakti S
Plaza Fortune 2nd—3
Jl. Mampang Prapatan 96 South
Phone (021) 7998711 (

PROTECOM
SECURITY SERVICES

LOYAL · TOUGH · DEPENDABLE

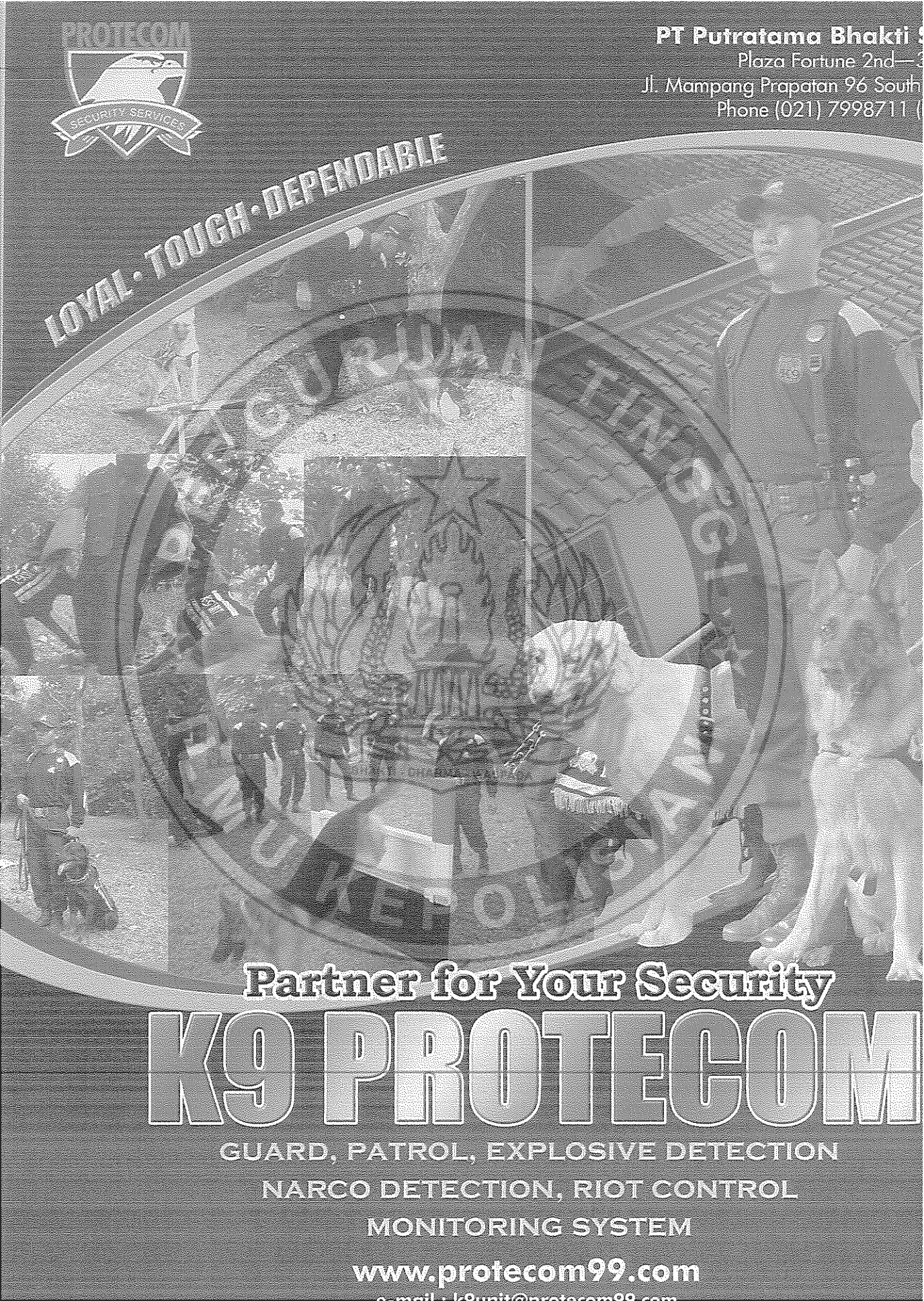

Partner for Your Security

K9 PROTECOM

GUARD, PATROL, EXPLOSIVE DETECTION
NARCO DETECTION, RIOT CONTROL
MONITORING SYSTEM

www.protecom99.com

e-mail : k9unit@protecom99.com